JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner
Vol. 01, No. 03, Tahun 2025, Hal. 1058-1064, ISSN: 3089-0128 (Online)

Pendidikan Anti Korupsi sebagai Pilar Pembentukan Karakter Bangsa

Alizar Muhammad Gatan
Universitas Bandar Lampung
Email : alizargatan123@gmail.com

Article Info

Article history:
Received April 01, 2025
Revised April 14, 2025
Accepted April 20, 2025

Keywords:
Anti-Corruption Education, Character, Integrity

ABSTRACT

Corruption is a systemic problem that hinders national development and undermines the very foundations of national life. Anti-corruption education is an effective preventive strategy for building integrity and anti-corruption character from an early age. This article aims to examine the role of anti-corruption education in shaping the character of students in Indonesia. Using a literature review method, this article examines relevant theories such as character education theory, social behavior theory, and values education approaches. The study results indicate that anti-corruption education integrated into the curriculum, supported by role models from educators, and designed in a participatory and contextual manner, can increase students' awareness and moral resilience against corrupt practices. Anti-corruption learning also fosters the values of honesty, responsibility, and justice as a foundation for social life. Strengthening the implementation of anti-corruption education through synergy between schools, families, and the community is needed.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info

Article history:
Received April 01, 2025
Revised April 14, 2025
Accepted April 20, 2025

Kata Kunci:
Pendidikan Anti Korupsi, Karakter, Integritas

ABSTRAK

Korupsi merupakan permasalahan sistemik yang menghambat pembangunan nasional dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa. Pendidikan anti korupsi menjadi strategi preventif yang efektif untuk membangun integritas dan karakter antikorupsi sejak dini. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran pendidikan anti korupsi dalam membentuk karakter peserta didik di Indonesia. Dengan menggunakan metode studi pustaka, artikel ini mengkaji teori-teori relevan seperti teori pendidikan karakter, teori perilaku sosial, dan pendekatan pendidikan nilai. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi yang terintegrasi dalam kurikulum, didukung oleh teladan dari tenaga pendidik, serta didesain secara partisipatif dan kontekstual, mampu meningkatkan kesadaran dan ketahanan moral peserta didik terhadap praktik korupsi. Pembelajaran antikorupsi juga menumbuhkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat. Diperlukan penguatan implementasi pendidikan anti korupsi melalui sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:
Alizar Muhammad Gatan
Universitas Bandar Lampung
E-mail: alizargatan123@gmail.com

PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi masalah struktural yang sangat kompleks dan mengakar dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tidak hanya menciptakan kerugian keuangan negara, korupsi juga menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga merambah hingga ke daerah, bahkan dalam lingkungan lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum, tetapi harus menyentuh akar permasalahan yang lebih dalam, yaitu moralitas dan integritas individu. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan. Reformasi birokrasi, penguatan regulasi, serta penindakan hukum terhadap pelaku korupsi menjadi langkah nyata yang terus digalakkan. Namun demikian, efektivitas dari pendekatan represif ini seringkali belum mampu memberikan efek jera yang signifikan. Dalam banyak kasus, pelaku korupsi tetap muncul dari berbagai kalangan, termasuk dari generasi muda yang sejatinya diharapkan menjadi agen perubahan masa depan bangsa. Melihat kondisi ini, muncul kesadaran bahwa pendekatan preventif melalui jalur pendidikan adalah salah satu solusi yang sangat strategis. Pendidikan, sebagai sarana pembentukan karakter dan moral generasi muda, diyakini memiliki peran besar dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sejak usia dini. Pendidikan anti korupsi menjadi alat penting dalam membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan dan menyentuh kesadaran pribadi setiap individu (Safnul & Silalahi, 2025).

Pendidikan anti korupsi bukan hanya sekadar memberikan pengetahuan tentang bentuk dan dampak korupsi, melainkan juga harus mampu membentuk sikap dan perilaku antikorupsi. Hal ini bisa dicapai melalui integrasi nilai-nilai antikorupsi ke dalam mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, serta contoh nyata dari para pendidik dan pemimpin sekolah. Selain itu, pembelajaran harus dirancang secara kontekstual agar peserta didik memahami dampak nyata dari korupsi terhadap kehidupan mereka dan masyarakat luas. Lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam proses ini. Sekolah dan perguruan tinggi harus menjadi tempat yang tidak hanya mengajarkan kecerdasan kognitif, tetapi juga membentuk karakter dan etika peserta didik. Guru dan dosen diharapkan menjadi role model yang menunjukkan integritas dalam tindakan sehari-hari, seperti dalam proses evaluasi, pengelolaan dana, hingga etika profesional. Pendidikan anti korupsi juga harus menyentuh aspek afektif dan psikomotorik, bukan hanya kognitif. Namun demikian, implementasi pendidikan anti korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah belum adanya kurikulum nasional yang secara spesifik dan menyeluruh membahas pendidikan antikorupsi pada semua jenjang pendidikan. Selain itu, tidak semua tenaga pendidik memiliki pemahaman atau pelatihan yang memadai mengenai materi antikorupsi. Banyak guru yang masih menganggap bahwa pendidikan antikorupsi adalah tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu saja, bukan bagian dari proses pendidikan yang mereka emban (Nurhasanah, 2024).

Tantangan lain yang juga penting adalah resistensi budaya. Di beberapa lingkungan sosial, praktik-praktik seperti memberi hadiah untuk mendapatkan pelayanan, atau menggunakan "orang dalam" untuk menyelesaikan urusan, masih dianggap wajar. Ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga budaya. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi harus mampu melakukan transformasi budaya dengan menyasar

pola pikir dan kebiasaan masyarakat sejak dini. Pendidikan anti korupsi juga harus melibatkan berbagai pihak, tidak hanya terbatas pada lembaga pendidikan. Orang tua, tokoh masyarakat, media, dan organisasi masyarakat sipil harus turut serta dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pembentukan karakter antikorupsi. Dengan pendekatan holistik ini, maka pendidikan antikorupsi tidak menjadi beban satu institusi saja, melainkan menjadi gerakan bersama dalam membentuk masyarakat yang berintegritas. Dalam konteks ini, penting untuk mengevaluasi dan mengembangkan model pendidikan anti korupsi yang tepat dan kontekstual. Pendidikan tersebut tidak harus dilakukan melalui mata pelajaran khusus, tetapi bisa diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran lain yang relevan, seperti Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan pelatihan soft skills. Model pembelajaran aktif, diskusi kasus, simulasi, serta proyek layanan masyarakat juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan pengalaman nyata peserta didik terhadap nilai-nilai integritas. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep, pelaksanaan, dan hasil dari pendidikan anti korupsi dalam konteks pembentukan karakter. Penelitian ini akan menguraikan landasan teoritis yang relevan, metode pendekatan pendidikan yang digunakan, serta menganalisis keberhasilan maupun kendala dalam penerapan pendidikan anti korupsi di Indonesia. Dengan pemahaman yang komprehensif, diharapkan kontribusi nyata pendidikan dalam pencegahan korupsi dapat terus ditingkatkan (Rahmandani et al., 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah untuk menggali konsep, teori, serta implementasi pendidikan anti korupsi berdasarkan sumber-sumber tertulis yang kredibel. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menyusun kerangka berpikir yang komprehensif dan mendalam melalui telaah terhadap literatur akademik, kebijakan pendidikan, dan praktik-praktik baik yang telah dilakukan dalam konteks pendidikan anti korupsi di Indonesia. Dengan demikian, pendekatan ini cocok untuk menjawab rumusan masalah yang bersifat deskriptif dan eksploratif. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku-buku teori pendidikan dan karakter, serta dokumen resmi seperti modul pendidikan anti korupsi dari KPK, kurikulum Kemendikbud, serta laporan implementasi pendidikan karakter di sekolah. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif, yaitu hanya menggunakan literatur yang relevan dengan topik dan memiliki kualitas akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria utama dalam pemilihan sumber adalah keterkaitan isi dengan pendidikan nilai, strategi pembentukan karakter, serta upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan. Proses analisis data dilakukan dengan teknik analisis konten (*content analysis*). Peneliti membaca dan menelaah isi dari setiap sumber literatur, kemudian mengkategorikan informasi ke dalam beberapa tema utama, seperti teori yang mendasari pendidikan anti korupsi, strategi implementasi di lembaga pendidikan, faktor pendukung dan penghambat, serta dampak yang dihasilkan. Setiap data yang diperoleh tidak hanya dikutip, tetapi juga dianalisis secara kritis dan diinterpretasikan dalam konteks pendidikan di Indonesia (Malik et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Integrasi Materi Antikorupsi dalam Kurikulum

Salah satu hasil yang menonjol dalam kajian ini adalah bahwa pendidikan antikorupsi telah mulai diintegrasikan ke dalam kurikulum formal, khususnya melalui mata pelajaran seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Pendidikan Agama, dan kadang-kadang dalam kegiatan ekstrakurikuler. Mata pelajaran tersebut memiliki ruang yang relevan untuk membahas nilai-nilai moral, integritas, dan etika. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dan lembaga pendidikan untuk memasukkan aspek pembentukan karakter dan nilai-nilai antikorupsi dalam sistem pendidikan nasional. Namun demikian, implementasi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum masih bersifat parsial dan belum menyentuh seluruh jenjang dan satuan pendidikan secara sistematis. Tidak semua sekolah memiliki pemahaman yang seragam mengenai bagaimana mengajarkan nilai antikorupsi secara efektif. Banyak sekolah yang hanya menyisipkan topik antikorupsi secara simbolis atau dalam bentuk penugasan terbatas, tanpa pendekatan pedagogis yang mendalam. Akibatnya, pendidikan antikorupsi menjadi kegiatan formalitas yang tidak menyentuh ranah afektif dan perilaku siswa. Kurangnya panduan teknis dan materi ajar yang terstruktur juga menjadi kendala. Buku-buku teks yang digunakan masih minim dalam memuat studi kasus aktual dan strategi pembelajaran aktif yang dapat mengajak siswa merenungkan serta menginternalisasi nilai kejujuran dan integritas. Guru pun cenderung menafsirkan pendidikan antikorupsi sebatas pada pembahasan teori tentang korupsi, tanpa melibatkan siswa dalam diskusi kritis atau proyek sosial yang aplikatif (Komang & Sintia, 2023).

Lebih jauh lagi, tidak adanya mata pelajaran khusus tentang antikorupsi menyebabkan topik ini bersifat “sisipan”, sehingga tidak menjadi fokus utama dalam proses pembelajaran. Hal ini membuat urgensi pendidikan antikorupsi sulit ditangkap oleh siswa secara serius. Padahal, untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi secara kuat, dibutuhkan pendekatan yang lebih intensif, konsisten, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Di sisi lain, beberapa inisiatif lokal telah menunjukkan hasil yang menjanjikan. Misalnya, sejumlah sekolah di bawah kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengembangkan modul pendidikan karakter berbasis antikorupsi. Sekolah-sekolah ini mengembangkan kegiatan pembelajaran tematik dan proyek yang menekankan integritas, transparansi, dan tanggung jawab. Meskipun masih terbatas, inisiatif semacam ini membuktikan bahwa integrasi materi antikorupsi bisa dilakukan dengan efektif jika ada kemauan dan dukungan kelembagaan. Oleh karena itu, untuk menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai bagian yang terintegrasi secara menyeluruh dalam kurikulum, dibutuhkan komitmen kuat dari pemerintah, penyedia kurikulum, dan lembaga pendidikan. Harus ada standardisasi kurikulum, pelatihan guru, serta pengembangan materi ajar dan metode pembelajaran yang kontekstual dan aplikatif. Tanpa hal tersebut, pendidikan antikorupsi akan tetap menjadi slogan tanpa dampak nyata dalam kehidupan peserta didik (Fahrezy et al., 2025).

2. Peran Guru sebagai Teladan Integritas

Guru memegang peranan kunci dalam keberhasilan pendidikan antikorupsi, tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai figur teladan yang mencerminkan nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam lingkungan pendidikan, siswa

lebih mudah terinspirasi oleh tindakan nyata dibandingkan ceramah semata. Oleh sebab itu, keteladanan guru dalam bersikap dan bertindak menjadi faktor penentu dalam pembentukan karakter peserta didik. Keteladanan ini mencakup hal-hal sederhana namun bermakna, seperti bersikap adil saat menilai, tidak menerima imbalan dari siswa atau orang tua, serta bersikap transparan dalam proses pembelajaran. Ketika guru mampu menunjukkan sikap jujur dalam setiap aspek tugasnya, maka nilai antikorupsi secara otomatis akan tersampaikan kepada siswa, bahkan tanpa disadari oleh guru itu sendiri. Sebaliknya, ketidakkonsistenan antara ucapan dan tindakan guru justru dapat melemahkan pesan moral yang ingin disampaikan. Sayangnya, hasil studi menunjukkan bahwa belum semua guru memiliki pemahaman mendalam mengenai pendidikan antikorupsi. Banyak dari mereka belum mendapatkan pelatihan khusus atau modul pembelajaran yang cukup dalam untuk mengajarkan nilai-nilai antikorupsi secara sistematis. Bahkan sebagian guru menganggap pendidikan antikorupsi sebagai urusan pemerintah atau hanya kewenangan guru PPKn, padahal seluruh guru memiliki peran dalam pembentukan karakter siswa (Setiawan, 2023).

Selain itu, tekanan administratif, beban kerja yang tinggi, serta minimnya insentif moral dan material juga membuat sebagian guru terjebak dalam rutinitas mengajar yang kaku, sehingga aspek nilai dan pembentukan karakter sering kali terabaikan. Dalam kondisi ini, guru cenderung fokus pada pencapaian akademik siswa dan mengabaikan pembentukan sikap antikorupsi sebagai bagian dari proses pendidikan holistik. Perlu adanya pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi para guru agar mereka memiliki kompetensi pedagogis dan afektif dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Pelatihan ini tidak hanya menekankan pada pemahaman materi, tetapi juga strategi mengajar yang partisipatif dan reflektif. Guru juga perlu diberikan ruang dan dukungan untuk mengembangkan kreativitas dalam mengajarkan nilai-nilai tersebut melalui metode yang relevan dengan konteks peserta didik. Dengan menjadikan guru sebagai agen perubahan dan panutan moral, pendidikan antikorupsi memiliki peluang besar untuk ditanamkan secara mendalam dalam kehidupan siswa. Perubahan sikap siswa akan lebih mudah terjadi jika mereka menyaksikan langsung nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab yang konsisten dari figur guru yang mereka hormati dan percayai. Oleh karena itu, penguatan peran guru adalah strategi kunci dalam keberhasilan pendidikan antikorupsi di lingkungan sekolah (Safnul & Silalahi, 2025).

3. Kolaborasi Sekolah, Orang Tua, dan Komunitas

Keberhasilan pendidikan antikorupsi tidak dapat disandarkan pada sekolah semata. Sekolah memang menjadi pusat pembelajaran formal, tetapi lingkungan keluarga dan komunitas tempat anak tumbuh juga memegang peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moral. Oleh sebab itu, kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan komunitas merupakan elemen strategis dalam membangun budaya antikorupsi yang komprehensif. Keluarga, sebagai lingkungan pertama dan utama dalam pendidikan anak, sangat menentukan dalam membentuk sikap dan perilaku dasar. Jika orang tua menunjukkan praktik antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari—misalnya tidak menyuap untuk mendapatkan layanan, berlaku jujur dalam transaksi, dan menjunjung keadilan dalam rumah tangga—maka anak akan terbiasa dengan nilai-nilai tersebut. Sebaliknya, ketidaksesuaian antara nilai yang diajarkan di sekolah dan praktik di rumah akan menciptakan kebingungan moral pada anak. Di sisi lain, komunitas

sekitar seperti RT/RW, organisasi kemasyarakatan, hingga media lokal juga bisa berperan dalam meneguhkan nilai-nilai antikorupsi. Kegiatan kampung integritas, forum warga, dan kerja bakti yang mengedepankan transparansi dan gotong royong merupakan contoh nyata pendidikan nilai di tingkat komunitas. Melalui kegiatan ini, anak-anak akan melihat langsung bagaimana nilai antikorupsi dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat (Nurhasanah, 2024).

Sekolah yang membangun komunikasi dan kerja sama yang intens dengan orang tua dan masyarakat akan lebih berhasil dalam membentuk karakter peserta didik. Beberapa sekolah telah menerapkan program "Sekolah Ramah Nilai" atau "Sekolah Integritas" yang melibatkan orang tua dalam kegiatan diskusi nilai, pelatihan parenting integritas, serta forum komunikasi antikorupsi. Hasilnya, siswa lebih konsisten dalam perilaku karena didukung oleh lingkungan yang sejalan antara rumah, sekolah, dan masyarakat. Namun, tantangan utama dalam membangun kolaborasi ini adalah kurangnya kesadaran dan kepedulian dari sebagian orang tua dan komunitas. Masih ada anggapan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab sekolah semata. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk melakukan pendekatan yang komunikatif dan edukatif kepada orang tua dan komunitas agar tercipta pemahaman bersama tentang pentingnya pendidikan antikorupsi. Dengan menguatkan kolaborasi sekolah, orang tua, dan komunitas, proses pendidikan antikorupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab individu guru atau kurikulum formal, tetapi menjadi bagian dari gerakan sosial yang lebih luas. Ketika anak-anak tumbuh dalam ekosistem yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, maka peluang untuk terbentuknya generasi antikorupsi akan semakin besar dan berkelanjutan (Rahmandani et al., 2024).

KESIMPULAN

Pendidikan anti korupsi terbukti menjadi strategi yang esensial dalam upaya preventif membangun generasi yang berkarakter dan berintegritas tinggi. Melalui pendekatan teori pendidikan karakter, teori perilaku sosial, serta pendidikan nilai, dapat dipahami bahwa pembentukan sikap antikorupsi tidak cukup dengan pemberian pengetahuan semata, melainkan membutuhkan internalisasi nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian secara berkelanjutan. Penanaman nilai ini harus terwujud dalam praktik pendidikan yang nyata, baik melalui kurikulum yang kontekstual, keteladanan guru, hingga metode pembelajaran yang reflektif dan partisipatif. Lebih jauh, keberhasilan pendidikan antikorupsi menuntut sinergi yang kuat antara sekolah, keluarga, dan komunitas. Ketiganya berperan dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang konsisten dalam menyuarakan dan menerapkan nilai integritas. Tanpa dukungan dari lingkungan luar sekolah, nilai-nilai yang diajarkan di kelas akan mudah tergerus oleh budaya permisif terhadap korupsi. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi harus dipandang bukan hanya sebagai program institusional, tetapi sebagai gerakan moral bersama untuk membangun masa depan bangsa yang bersih, adil, dan berdaya saing tinggi secara etis.

DAFTAR PUSTAKA

David, M., Arifin, Z., Romadhoni, D., Sistem, P., Kapal, K., Malahayati, P. P., & David, M. (2023). Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi : Menjawab Tantangan Moral Generasi Z. *Pancasila and Civics Education Journal*, *2*(3), 10–14. https://doi.org/10.30596/jcositte.v1i1.xxxx

Fahrezy, K. S., Abir, J., Widodo, P., Uyun, K., Laila, I., & Nimah, R. (2025). Pendidikan Anti Korupsi di SMK Pandanaran : Membangun Generasi Muda Sebagai Pilar Bangsa. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *8*(1), 768–779. https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6661

Hasan, Z., Wijaya, B. S., Yansah, A., Setiawan, R., & Yuda, A. D. (2024). Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas AntiKorupsi Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, *2*(2), 241–255. https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1883

Komang, N., & Sintia, A. (2023). IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN KARAKTER DAN INTEGRITAS MAHASISWA MELALUI PAK (PENDIDIKAN ANTI KORUPSI). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, *3*(1), 45–57.

Malik, F., Adhyaksa, A., & Djafar, M. M. M. (2024). Pendidikan Karakter Anti Korupsi Bagi Kalangan Remaja dalam Upaya Dini Memberantas Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Human And Education*, *4*(4), 144–152.

Nurhasanah, S. (2024). PERAN MAHASISWA SEBAGAI PILAR INTEGRITAS DALAM GERAKAN ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN KAMPUS DAN MASYARAKAT. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, *6*(5), 1–9.

Rahmandani, F., Handayani, T., & Kurniawan, M. W. (2024). Penguatan Nilai-Nilai Antikorupsi Berbasis Pendekatan Aksiologis kepada Peserta Didik SMA. *Pendekar : Jurnal Pendidikan Berkarakter*, *7*(4), 1–12.

Safnul, D., & Silalahi, D. H. (2025). MODERASI BERAGAMA SEBAGAI PILAR PEMBENTUKAN KARAKTER PENEGAK HUKUM ANTIKORUPSI DI INDONESIA. *Seminar Nasional Universitas Dharmawangsa*, *1*(1), 348–354.

Setiawan, A. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pembentukan Karakter , Perilaku Individu Melalui Potensi Mahasiswa di Perguruan Tinggi. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran Vol.*, *01*(01), 1–9.

Sogian, P., & Thomas, S. (2024). PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI LANDASAN NILAI INTEGRITAS YANG BAIK BAGI MAHASISWA. *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)*, *4*(1), 96–100.